

BAB VI

PENUTUP

V.I Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa Australia sebagai negara peratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951 memiliki kepentingan dalam masa awal penandatanganannya, yaitu dalam menumbuhkan demografi setelah Perang Dunia II. Dengan memberikan ruang terhadap kedaulatannya, Australia mengizinkan pencari suaka masuk ke dalam negaranya dengan konsep *invitation*. Namun, di saat kedatangan pencari suaka sudah tidak lagi diharapkan dan mulai tidak terkontrol karena banyaknya konflik berkecamuk di belahan dunia lain, Australia dengan alasan ancaman keamanan dan kedaulatan negara menutup lagi ruang bagi pencari suaka terutama yang datang dengan menggunakan perahu. Australia di bawah pemerintahan Abbott bahkan abai terhadap citra baiknya dalam dunia internasional atas penegakkan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasinya.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kebijakan Australia dalam menangani pencari suaka melalui *Operation Sovereign Borders* era Tony Abbott, Abbott menggunakan pendekatan sekuritisasi. Sekuritisasi tersebut merupakan bentuk transformasi suatu fenomena, yang dalam hal ini adalah kedatangan pencari suaka yang dikaitkan sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Kebijakan *Operation Sovereign Borders* yang diberlakukan pemerintah Australia pada masa pemerintahan Tony Abbott tahun 2013 – 2015 lahir sebagai pemahaman pemerintah Australia yang menganggap pencari suaka sebagai ancaman nyata terhadap masyarakat dan negara. Dalam konsep kedaulatan, Australia khawatir bahawa apabila suatu negara tidak dapat mengontrol entitas yang melewati batas negaranya, lantas negara tersebut tidak mampu mengendalikan apa yang akan terjadi di dalam wilayah negaranya. Maka dari itu, dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa migrasi merupakan pertahanan terakhir kedaulatan sehingga pemerintah Australia meyakini bahwa kedatangan pencari suaka adalah ancaman terhadap

kedaulatan dan diperlukan adanya pendekatan sekuritisasi dalam penanganan pencari suaka (Dewansyah, 2015).

Pendekatan sekuritisasi memahami implementasi kebijakan OSB yang punitif kepada pencari suaka dilakukan oleh pemerintah dan elit politik sebagai aktor utama dengan melibatkan media massa dalam mengkonstruksi opini publik Australia. Permasalahan pencari suaka sebagai ancaman atau *realistic threat* sudah dipolitisasi sebelumnya sehingga menjadi perdebatan publik menjelang pemilu federal 2013. Sejalan dengan politisasi tersebut, proses sekuritisasi pencari suaka dilakukan dengan menggaungkan *speech act* pencari suaka sebagai ilegal migran dan merupakan ancaman nyata yang akan melakukan tindak kejahatan bagi publik Australia yang merupakan *referent object*.

Proses sekuritisasi yang dilakukan melalui *speech act* berupa pernyataan resmi pemerintah Australia, berita-berita yang ditayangkan oleh stasiun TV Australia, poster, dan berbagai visualisasi lainnya untuk memberikan persepsi negatif pencari suaka yang datang dengan perahu. Dalam pemberitaan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dan mayoritas media massa, pencari suaka tidak ditampilkan sebagai individu yang terancam atas persekusi dan memerlukan perlindungan, sebaliknya pemerintah Australia melakukan *premature labelling* dengan menarasikan pencari suaka sebagai ancaman atas nilai-nilai dan identitas Australia.

Sekuritisasi yang dilakukan pemerintahan Tony Abbott dikatakan berhasil melihat adanya keyakinan publik Australia bahwa pencari suaka bukanlah pengungsi *genuine* dan tidak layak mendapat perlindungan di negara mereka. Diterima dan didukungnya kebijakan OSB sebagai jawaban atas penanganan pencari suaka menunjukkan bahwa warga Australia setuju dengan wacana yang diberikan pemerintah sehingga mendukung langkah penggunaan militer dalam menekan kedatangan pencari suaka ke negaranya. Atas alasan inilah yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi terhadap komitmen Australia terhadap rezim pengungsi internasional.

V.2 Saran

Keberhasilan sekuritisasi pencari suaka oleh pemerintah Australia ditunjukkan dari tingginya partisipasi publik dalam mendukung kebijakan OSB. Pada skripsi ini dapat dilihat bahwa negara masih tetap menjadi aktor utama dalam pembentukan opini publik, kekuatan militer memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas baik keamanan dan kedaulatan hingga pencapaian kepentingan nasional. Sementara dalam penanganan pencari suaka yang sejatinya membutuhkan perlindungan, saran penulis adalah bahwa agar negara sejatinya memerhatikan prinsip-prinsip standar perlindungan HAM terutama dalam kebijakan penahanan yang dilakukan. Selain itu, kerangka kerja sama juga diperlukan dengan negara lain yang memungkinkan untuk proses pemukiman kembali dan juga organisasi nonpemerintah seperti UNHCR, IOM dan sejenisnya dalam penanganan pencari suaka yang lebih humanis. Menurut sumber-sumber pertahanan, satu-satunya cara yang aman untuk mengembalikan kapal adalah bagi pejabat Australia untuk mengalihkan kendali atas kapal yang dicegat ke Angkatan Laut Indonesia di tepi perairan teritorial Indonesia, atau sebagai alternatif untuk mengangkut kapal yang dicegat langsung ke pantai Indonesia. Kedua hal ini akan membutuhkan kerja sama dari Pemerintah Indonesia. Ada baiknya pemerintah Australia lebih menggiatkan kerja sama dengan negara-negara perlintasan jalur pencari suaka.

Saran penulis bagi penelitian pencari suaka selanjutnya adalah dengan meneliti dari sisi negara yang dilalui pencari suaka sebagai negara transit, dan penelitian lain pencari suaka dianggap sebagai kelompok lain atau *outgroup* dari kelompok sosial suatu budaya. Peneliti lain juga bisa menjelaskan bagaimana kepatuhan negara terhadap suatu rezim, dalam hal ini adalah rezim internasional pengungsi. Bentuk-bentuk negosiasi apa sajakah yang dinegosiasikan dalam rezim internasional tersebut serta implikasinya terhadap suatu kedaulatan negara. Masalah imigrasi juga tidak luput dari saran penulis, negara baiknya memberik kesempatan pencari suaka untuk menjelaskan alasan kedatangannya.